

Internalization of the Concepts of Justice and Maslahah in Economic Education

Internalisasi Konsep Keadilan dan Maslahah dalam Pendidikan Ekonomi

Nabila Rasha¹, Arizul Suwar², T. Nazarullah³

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Iskandar Thani, Aceh, Indonesia

^{2,3} Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah Aceh Barat, Aceh, Indonesia

Email Korespondensi: arizul@staidarulhikmah.ac.id

Abstract

This article aims to analyze the internalization of the concepts of justice and maslahah in economic education as an effort to develop a learning paradigm that is oriented not only toward efficiency and growth, but also toward ethical values and social benefit. This study employs a qualitative approach based on a literature review, examining works in Islamic economics, philosophy of education, and curriculum theory. The findings indicate that the concept of justice in Islamic economic thought encompasses proportional distribution, the avoidance of exploitation, and the balanced fulfillment of rights and obligations. Meanwhile, maslahah emphasizes the orientation of economic policies and activities toward sustainable collective welfare. The internalization of these concepts in economic education can be implemented through value integration within the curriculum, reflective learning approaches, and the strengthening of moral dimensions in economic case analysis. This article argues that an economic education grounded in justice and maslahah has the potential to produce graduates who are not only technically competent but also ethically sensitive and socially responsible in economic practice.

Keywords: Justice, Maslahah, Economic Education, Islamic Economics.

Abstrak

Artikel ini bertujuan menganalisis internalisasi konsep keadilan dan masalah dalam pendidikan ekonomi sebagai upaya membangun paradigma pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga pada dimensi etika dan kebermanfaatan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian pustaka dengan menelaah literatur ekonomi Islam, filsafat pendidikan, dan teori kurikulum. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam perspektif ekonomi Islam mencakup distribusi yang proporsional, penghindaran eksploitasi, serta penegakan hak dan kewajiban secara seimbang. Sementara itu, masalah menekankan orientasi kebijakan dan aktivitas ekonomi pada kemanfaatan kolektif yang berkelanjutan. Internalisasi kedua konsep tersebut dalam pendidikan ekonomi dapat dilakukan melalui integrasi nilai dalam kurikulum, pendekatan pembelajaran reflektif, serta penguatan dimensi moral dalam analisis kasus ekonomi. Artikel ini menegaskan bahwa pendidikan ekonomi yang berbasis keadilan dan masalah berpotensi membentuk lulusan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki sensitivitas etis dan tanggung jawab sosial dalam praktik ekonomi.

Kata kunci: *Keadilan, Masalah, Pendidikan Ekonomi, Ekonomi Islam.*

Pendahuluan

Pendidikan ekonomi selama beberapa dekade terakhir cenderung berkembang dalam kerangka paradigma arus utama yang menekankan rasionalitas individual, efisiensi alokasi sumber daya, dan pertumbuhan sebagai indikator utama keberhasilan sistem ekonomi (Suryadi, 2025). Orientasi tersebut tidak sepenuhnya keliru, namun dalam praktiknya sering kali menghasilkan reduksi makna ekonomi menjadi sekadar kalkulasi utilitas dan keuntungan. Konsekuensinya, dimensi etika, tanggung jawab sosial, dan kebermanfaatan kolektif kurang memperoleh perhatian proporsional dalam proses pembelajaran (Faried, 2025). Dalam konteks ini, muncul kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi pendidikan ekonomi agar tidak hanya membentuk kompetensi teknis, tetapi juga kesadaran moral dan orientasi nilai.

Di tengah kritik terhadap pendekatan ekonomi yang terlalu positivistik dan bebas nilai, ekonomi Islam menawarkan landasan normatif yang menempatkan keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*) sebagai prinsip fundamental (Aulia, 2025). Keadilan dalam perspektif ini tidak terbatas pada distribusi pendapatan, tetapi mencakup penegakan hak dan kewajiban secara seimbang, pencegahan eksploitasi, serta pengakuan atas martabat manusia dalam aktivitas ekonomi. Sementara itu, konsep *maslahah* mengandung dimensi kemanfaatan yang luas, yakni segala sesuatu yang membawa kebaikan dan mencegah kerusakan bagi individu maupun masyarakat secara berkelanjutan. Kedua konsep tersebut bersifat

integratif dan saling melengkapi: keadilan memberikan kerangka normatif, sedangkan masalah memberikan orientasi tujuan.

Meskipun wacana keadilan dan masalah telah banyak dibahas dalam literatur ekonomi Islam dan fikih muamalah, integrasinya dalam pendidikan ekonomi belum sepenuhnya terstruktur secara konseptual. Pada tataran kurikulum, pembelajaran ekonomi—baik di tingkat sekolah menengah maupun perguruan tinggi—sering kali masih didominasi oleh teori-teori yang berorientasi pada pasar dan pertumbuhan, tanpa disertai refleksi kritis terhadap implikasi sosialnya (Murniawaty, 2025). Mahasiswa dilatih untuk menganalisis permintaan dan penawaran, elastisitas, atau efisiensi pasar, tetapi belum tentu diajak untuk mempertanyakan apakah mekanisme tersebut menghasilkan distribusi yang adil atau kemaslahatan yang merata. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara penguasaan instrumen analitis dan pembentukan orientasi nilai.

Dalam perspektif filsafat pendidikan, pendidikan tidak pernah netral secara nilai. Setiap sistem pendidikan selalu membawa asumsi ontologis, epistemologis, dan aksiologis tertentu (Abduh, 2024). Jika pendidikan ekonomi hanya menekankan aspek deskriptif dan teknis, maka secara implisit ia juga sedang mentransmisikan nilai-nilai tertentu, seperti individualisme ekonomi atau utilitarianisme sempit. Oleh karena itu, internalisasi keadilan dan masalah bukan sekadar penambahan materi normatif, melainkan upaya mereorientasi landasan aksiologis pendidikan ekonomi. Proses internalisasi ini mengandaikan transformasi pada tiga level: konseptual

(pemahaman teoretis tentang keadilan dan masalah), kurikuler (integrasi nilai dalam struktur dan capaian pembelajaran), serta pedagogis (metode pembelajaran yang reflektif dan kontekstual).

Urgensi internalisasi tersebut semakin relevan dalam konteks masyarakat yang menghadapi ketimpangan ekonomi, krisis lingkungan, dan problem etika bisnis. Ketimpangan distribusi kekayaan, misalnya, bukan hanya persoalan teknis pasar, tetapi juga persoalan keadilan struktural. Demikian pula eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan menunjukkan kegagalan dalam mempertimbangkan kemaslahatan jangka panjang. Jika pendidikan ekonomi tidak memberikan kerangka normatif untuk membaca persoalan-persoalan tersebut, maka lulusan yang dihasilkan berpotensi terjebak dalam pendekatan instrumental yang sempit. Sebaliknya, pendidikan yang berbasis keadilan dan masalah dapat membekali mahasiswa dengan kemampuan analitis sekaligus sensitivitas etis.

Artikel ini berangkat dari pertanyaan mendasar: bagaimana konsep keadilan dan masalah dapat diinternalisasikan secara sistematis dalam pendidikan ekonomi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian pustaka dengan menelaah literatur ekonomi Islam, teori pendidikan, dan studi tentang pengembangan kurikulum berbasis nilai. Tujuannya bukan sekadar memaparkan definisi normatif, tetapi merumuskan kerangka konseptual yang dapat menjadi dasar integrasi nilai dalam praktik pembelajaran.

Secara teoretis, artikel ini berkontribusi pada penguatan diskursus pendidikan ekonomi Islam dengan menekankan dimensi aksiologisnya. Secara praktis, temuan kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembang kurikulum dan dosen dalam merancang pembelajaran yang lebih reflektif dan bernilai. Dengan demikian, pendidikan ekonomi tidak lagi dipahami sebagai ruang transmisi teori pasar semata, tetapi sebagai arena pembentukan karakter ekonomi yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Melalui kerangka tersebut, internalisasi keadilan dan masalah diposisikan bukan sebagai agenda tambahan, melainkan sebagai inti dari transformasi pendidikan ekonomi. Transformasi ini menuntut konsistensi antara tujuan, materi, dan metode pembelajaran sehingga nilai-nilai yang diajarkan tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi menjadi kesadaran dan orientasi tindakan dalam praktik ekonomi nyata.

Tinjauan Pustaka

Konsep Keadilan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Keadilan (*'adl*) merupakan prinsip normatif yang fundamental dalam bangunan epistemologis ekonomi Islam (Ramadhani, 2025). Secara konseptual, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan formal, tetapi sebagai penempatan sesuatu pada tempatnya secara proporsional. Dalam literatur ekonomi Islam, keadilan berkaitan erat dengan distribusi kekayaan, perlindungan hak kepemilikan, larangan eksploitasi, dan pengakuan atas tanggung jawab sosial dalam aktivitas

ekonomi. Prinsip ini menuntut keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif, serta antara kebebasan berusaha dan regulasi moral.

Dalam kerangka distribusi, keadilan tidak selalu identik dengan kesamaan hasil (*equality of outcome*), melainkan dengan keadilan prosedural dan struktural. Mekanisme zakat, larangan riba, dan prinsip bagi hasil dalam keuangan Islam mencerminkan upaya institusionalisasi keadilan dalam sistem ekonomi. Dengan demikian, keadilan dalam ekonomi Islam memiliki dimensi normatif (nilai moral), institusional (aturan dan mekanisme), dan praksis (implementasi dalam transaksi ekonomi) (Mubarok, 2025). Ketiga dimensi ini menjadi landasan penting dalam upaya internalisasi nilai keadilan dalam pendidikan ekonomi.

Konsep Masalah sebagai Orientasi Tujuan Ekonomi

Masalah secara umum dipahami sebagai segala sesuatu yang membawa kemanfaatan dan mencegah kerusakan bagi manusia. Dalam tradisi pemikiran Islam, konsep ini berhubungan dengan tujuan-tujuan syariah (*maqasid al-shari'ah*), yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ekonomi, masalah mengarahkan aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi agar tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan keberlanjutan jangka panjang.

Berbeda dari pendekatan utilitarian yang menekankan agregasi kepuasan individual, masalah menempatkan kemanfaatan dalam kerangka moral dan tanggung jawab kolektif. Ia mengandung dimensi kualitas, bukan sekadar kuantitas

manfaat. Oleh karena itu, suatu aktivitas ekonomi tidak dapat dinilai semata-mata dari efisiensi atau profitabilitasnya, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan sosial, stabilitas masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Dalam pendidikan ekonomi, orientasi masalah berfungsi sebagai kerangka evaluatif untuk menilai kebijakan dan praktik ekonomi secara lebih komprehensif.

Pendidikan Ekonomi dan Dimensi Aksiologis

Literatur tentang pendidikan ekonomi menunjukkan bahwa pembelajaran ekonomi sering kali didominasi oleh pendekatan teknis-analitis yang menekankan model matematis dan asumsi rasionalitas (Wahjoedi, 2022). Pendekatan ini efektif dalam melatih kemampuan analisis, tetapi berpotensi mengabaikan dimensi aksiologis atau nilai yang melekat dalam setiap kebijakan ekonomi. Padahal, setiap teori ekonomi mengandung asumsi normatif tertentu, baik secara eksplisit maupun implisit.

Dalam perspektif filsafat pendidikan, dimensi aksiologis berkaitan dengan tujuan dan nilai yang hendak ditanamkan melalui proses pembelajaran. Pendidikan yang hanya mentransfer pengetahuan tanpa refleksi nilai berisiko menghasilkan kompetensi yang terlepas dari tanggung jawab moral. Oleh karena itu, integrasi nilai keadilan dan masalah dalam pendidikan ekonomi merupakan bagian dari upaya memperkuat dimensi aksiologis pembelajaran. Integrasi ini dapat dilakukan melalui perumusan capaian pembelajaran berbasis

nilai, penyusunan materi yang kontekstual, serta penggunaan studi kasus yang mendorong refleksi etis.

Internalisasi Nilai dalam Kurikulum

Konsep internalisasi nilai dalam pendidikan merujuk pada proses penanaman nilai sehingga menjadi bagian dari kesadaran dan orientasi tindakan peserta didik (Ristianah, 2020). Proses ini tidak cukup dilakukan melalui penyampaian materi normatif, tetapi memerlukan strategi pedagogis yang dialogis dan reflektif. Dalam konteks kurikulum, internalisasi nilai mencakup tiga aspek: integrasi nilai dalam tujuan pembelajaran, pengembangan materi yang relevan, dan evaluasi yang mempertimbangkan dimensi sikap serta tanggung jawab sosial.

Berbagai studi tentang pendidikan berbasis nilai menunjukkan bahwa keberhasilan internalisasi ditentukan oleh konsistensi antara isi kurikulum dan praktik pembelajaran. Jika nilai hanya hadir sebagai wacana tambahan tanpa terintegrasi dalam analisis ekonomi, maka proses internalisasi akan bersifat superfisial. Oleh sebab itu, dalam pendidikan ekonomi berbasis keadilan dan masalah, diperlukan desain kurikulum yang secara eksplisit menghubungkan teori ekonomi dengan pertimbangan etis dan kemaslahatan publik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah membangun kerangka konseptual mengenai internalisasi keadilan dan

masalah dalam pendidikan ekonomi, bukan menguji hipotesis kuantitatif. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi mendalam terhadap sumber-sumber teoretis yang relevan, baik dalam bidang ekonomi Islam, filsafat pendidikan, maupun teori pengembangan kurikulum berbasis nilai. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis konseptual dan sintesis teoretis (Sugiyono, 2013).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas literatur primer dan sekunder. Literatur primer meliputi karya-karya klasik dan kontemporer tentang konsep keadilan dan masalah dalam ekonomi Islam, serta dokumen normatif terkait tujuan pendidikan. Literatur sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah, buku teks pendidikan ekonomi, dan penelitian terdahulu yang membahas integrasi nilai dalam pembelajaran. Kriteria pemilihan sumber didasarkan pada relevansi topik, otoritas akademik penulis, serta kontribusinya terhadap pengembangan kerangka konseptual penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, klasifikasi, dan dokumentasi literatur yang relevan. Selanjutnya, analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan langkah-langkah: (1) reduksi data melalui seleksi konsep-konsep kunci, (2) kategorisasi tema berdasarkan dimensi keadilan, masalah, dan pendidikan ekonomi, serta (3) sintesis konseptual untuk merumuskan model internalisasi nilai. Analisis dilakukan secara interpretatif-kritis untuk memastikan keterkaitan logis antar-konsep dan konsistensi argumentasi.

Untuk menjaga validitas akademik, penelitian ini menerapkan prinsip triangulasi sumber, yakni membandingkan berbagai pandangan dalam literatur yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Selain itu, analisis dilakukan secara sistematis dan transparan agar dapat direplikasi secara konseptual oleh peneliti lain. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan memiliki koherensi teoretis dan kontribusi yang jelas terhadap pengembangan pendidikan ekonomi berbasis keadilan dan masalah.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

a. Rekonstruksi Kerangka Konseptual Keadilan dan Masalah dalam Pendidikan Ekonomi

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa keadilan dan masalah tidak dapat diposisikan sebagai nilai tambahan dalam pendidikan ekonomi, melainkan sebagai kerangka normatif yang membentuk orientasi keseluruhan proses pembelajaran. Keadilan berfungsi sebagai prinsip regulatif yang mengarahkan bagaimana aktivitas ekonomi dipahami dan dievaluasi, sedangkan masalah menjadi orientasi teleologis yang menentukan tujuan akhir dari aktivitas tersebut (Ibrahim, 2025). Dengan demikian, keduanya membentuk struktur konseptual yang saling melengkapi: keadilan menegaskan standar moral, sementara masalah menegaskan arah kebermanfaatannya.

Dalam konteks pendidikan ekonomi, rekonstruksi ini menuntut redefinisi tujuan pembelajaran. Jika selama ini capaian

pembelajaran lebih menekankan kemampuan analisis pasar dan pengambilan keputusan rasional, maka melalui kerangka keadilan dan masalah, capaian tersebut diperluas dengan dimensi tanggung jawab sosial dan evaluasi etis. Mahasiswa tidak hanya diajak memahami bagaimana mekanisme pasar bekerja, tetapi juga menilai apakah hasil dari mekanisme tersebut mencerminkan distribusi yang proporsional dan membawa kemanfaatan kolektif.

Kerangka konseptual ini juga menegaskan bahwa keadilan tidak semata-mata berkaitan dengan distribusi hasil akhir, tetapi mencakup keadilan prosedural dalam proses produksi dan pertukaran. Sementara itu, masalah mengarahkan agar setiap kebijakan atau keputusan ekonomi dianalisis berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan jangka panjang. Dengan demikian, pendidikan ekonomi berbasis keadilan dan masalah memiliki orientasi integratif yang menghubungkan aspek analitis dan normatif secara simultan.

b. Model Integrasi Nilai dalam Kurikulum dan Pembelajaran

Temuan penelitian menunjukkan bahwa internalisasi keadilan dan masalah dalam pendidikan ekonomi dapat dirumuskan melalui tiga level integrasi: kurikuler, instruksional, dan evaluatif (Sari, 2025). Pada level kurikuler, nilai keadilan dan masalah diintegrasikan dalam rumusan capaian pembelajaran dan deskripsi mata kuliah. Hal ini berarti setiap topik, seperti teori pasar, kebijakan fiskal, atau pembangunan

ekonomi, disertai indikator pembelajaran yang mencakup kemampuan refleksi etis dan analisis dampak sosial.

Pada level instruksional, strategi pembelajaran reflektif menjadi instrumen utama internalisasi. Metode seperti studi kasus, diskusi kritis, dan *problem-based learning* memungkinkan mahasiswa mengaitkan teori ekonomi dengan realitas ketimpangan, kemiskinan, atau eksploitasi sumber daya. Dalam proses ini, nilai keadilan dan masalah tidak disampaikan sebagai dogma, tetapi sebagai kerangka analisis yang diuji melalui dialog akademik. Pendekatan ini memperkuat internalisasi karena mahasiswa terlibat secara aktif dalam proses penalaran moral.

Pada level evaluatif, penilaian tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pertimbangan etis dalam analisis ekonomi. Instrumen evaluasi dapat berupa esai analitis, refleksi tertulis, atau proyek berbasis masalah sosial-ekonomi. Dengan pendekatan ini, internalisasi nilai tidak berhenti pada pemahaman konseptual, tetapi tercermin dalam cara mahasiswa merumuskan solusi ekonomi yang adil dan berorientasi kemaslahatan.

c. Implikasi terhadap Pembentukan Karakter

Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan ekonomi yang menginternalisasikan keadilan dan masalah berimplikasi langsung pada pembentukan karakter ekonomi mahasiswa (Firdiansyah, 2024). Karakter yang dimaksud bukan sekadar sikap normatif, melainkan disposisi intelektual dan moral dalam menghadapi persoalan ekonomi. Mahasiswa yang dibekali kerangka ini cenderung memiliki sensitivitas terhadap isu

ketimpangan, keberlanjutan lingkungan, dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Implikasi lainnya adalah terbentuknya kemampuan berpikir integratif. Mahasiswa tidak lagi melihat ekonomi sebagai sistem yang otonom dan terlepas dari nilai, melainkan sebagai bagian dari tatanan sosial yang memiliki konsekuensi moral. Dengan demikian, analisis ekonomi tidak berhenti pada perhitungan biaya dan manfaat finansial, tetapi mencakup pertimbangan distribusi, akses, dan dampak jangka panjang terhadap masyarakat.

Secara lebih luas, internalisasi keadilan dan masalah memperkuat orientasi pendidikan ekonomi sebagai sarana pembentukan agen perubahan sosial. Lulusan tidak hanya diproyeksikan menjadi analis atau praktisi yang efisien, tetapi juga aktor yang berkomitmen pada praktik ekonomi yang adil dan membawa kemaslahatan bersama. Temuan ini menegaskan bahwa transformasi pendidikan ekonomi berbasis nilai memiliki potensi strategis dalam membangun sistem ekonomi yang lebih berkeadilan.

2. Pembahasan

a. Integrasi Normativitas dan Analisis Positif dalam Pendidikan Ekonomi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa internalisasi keadilan dan masalah menuntut reposisi epistemologis pendidikan ekonomi. Selama ini, dikotomi antara pendekatan positif (deskriptif-analitis) dan normatif (preskriptif-etik) sering

dipahami secara rigid. Ekonomi diajarkan sebagai ilmu yang “netral nilai”, sementara pertimbangan moral ditempatkan di luar kerangka analisis utama. Namun, asumsi netralitas tersebut secara filosofis problematik, karena setiap teori ekonomi dibangun di atas asumsi tertentu tentang manusia, rasionalitas, dan tujuan hidup. Dengan demikian, pendidikan ekonomi yang mengklaim bebas nilai sesungguhnya tetap mengandung nilai, hanya saja tidak dinyatakan secara eksplisit.

Internalisasi keadilan dan masalah tidak berarti menegasikan analisis positif, melainkan mengintegrasikannya dalam kerangka aksiologis yang jelas. Analisis permintaan-penawaran, efisiensi Pareto, atau teori pilihan rasional tetap relevan sebagai instrumen analitis. Akan tetapi, instrumen tersebut perlu ditempatkan dalam horizon evaluatif yang mempertimbangkan distribusi manfaat dan dampak sosial. Di sinilah keadilan berfungsi sebagai prinsip regulatif dan masalah sebagai orientasi tujuan. Pendidikan ekonomi yang terintegrasi secara normatif tidak kehilangan ketajaman analitisnya, justru memperoleh kedalaman reflektif yang lebih komprehensif.

b. Keadilan sebagai Prinsip Struktural, Masalah sebagai Orientasi Teleologis

Lebih lanjut menunjukkan bahwa keadilan dan masalah memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi dalam konstruksi pendidikan ekonomi. Keadilan berperan sebagai prinsip struktural yang mengatur relasi antar-aktor ekonomi. Ia mengarahkan perhatian pada isu distribusi, akses terhadap sumber daya, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Dalam

konteks pembelajaran, keadilan mendorong mahasiswa untuk menganalisis struktur pasar dan kebijakan publik secara kritis, khususnya dalam kaitannya dengan ketimpangan dan eksklusi sosial.

Sebaliknya, masalah memiliki karakter teleologis, yakni berorientasi pada tujuan akhir berupa kemanfaatan kolektif yang berkelanjutan. Masalah memperluas horizon analisis dari jangka pendek ke jangka panjang, dari kepentingan individual ke kepentingan sosial, dan dari keuntungan finansial ke keberlanjutan moral serta ekologis. Dalam pembelajaran, orientasi masalah mengarahkan mahasiswa untuk mengevaluasi kebijakan ekonomi tidak hanya berdasarkan output kuantitatif, tetapi juga berdasarkan kualitas kesejahteraan yang dihasilkan.

Relasi keduanya dapat dipahami sebagai hubungan antara standar dan arah. Keadilan menetapkan standar normatif mengenai apa yang dapat diterima secara moral dalam interaksi ekonomi, sedangkan masalah menentukan arah strategis kebijakan dan tindakan ekonomi. Integrasi keduanya dalam pendidikan ekonomi menghasilkan kerangka evaluatif yang tidak parsial, tetapi menyeluruh.

c. Implikasi Pedagogis dan Transformasi Orientasi Lulusan

Secara pedagogis, internalisasi keadilan dan masalah menuntut transformasi pendekatan pembelajaran. Model ceramah satu arah yang berorientasi pada transmisi teori kurang memadai untuk menanamkan nilai secara mendalam. Diperlukan pendekatan dialogis dan problematis yang mendorong

mahasiswa menguji asumsi, mempertanyakan implikasi kebijakan, dan mengembangkan argumentasi etis berbasis analisis ekonomi. Proses ini memperkuat dimensi reflektif dalam pembelajaran dan menghindarkan nilai dari sekadar slogan normatif.

Lebih jauh, pembahasan ini menegaskan bahwa orientasi lulusan yang dihasilkan dari pendidikan ekonomi berbasis keadilan dan masalah berbeda secara substantif dari orientasi instrumental semata. Lulusan tidak hanya diarahkan untuk menjadi aktor ekonomi yang efisien, tetapi juga agen yang memiliki komitmen etis terhadap keseimbangan sosial dan keberlanjutan. Orientasi ini penting dalam konteks tantangan kontemporer seperti ketimpangan global, krisis lingkungan, dan praktik bisnis yang eksploitatif.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa internalisasi keadilan dan masalah bukan sekadar agenda moral tambahan, melainkan bagian integral dari rekonstruksi paradigma pendidikan ekonomi. Integrasi tersebut memperkaya dimensi analitis sekaligus memperjelas orientasi normatif pembelajaran. Pendidikan ekonomi yang demikian berpotensi melahirkan generasi yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kesadaran struktural dan tanggung jawab sosial yang kuat dalam praktik ekonomi nyata.

Kesimpulan

Artikel ini menegaskan bahwa internalisasi konsep keadilan dan masalah dalam pendidikan ekonomi bukan

sekadar integrasi nilai normatif secara aditif, melainkan rekonstruksi paradigma yang menyentuh dimensi epistemologis dan aksiologis pembelajaran. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan kerangka integratif yang secara sistematis memosisikan keadilan sebagai prinsip struktural-regulatif dan masalah sebagai orientasi teleologis dalam desain kurikulum, strategi pembelajaran, dan evaluasi. Dengan demikian, pendidikan ekonomi tidak lagi dipahami sebagai transmisi instrumen analitis yang netral, tetapi sebagai proses pembentukan kesadaran intelektual dan moral yang terintegrasi. Model konseptual yang ditawarkan memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan pendidikan ekonomi Islam, khususnya dalam memperjelas relasi antara analisis positif dan komitmen normatif.

Secara praktis, indikator keberhasilan internalisasi dapat diukur melalui tiga aspek utama: (1) integrasi eksplisit nilai keadilan dan masalah dalam capaian pembelajaran dan perangkat kurikulum, (2) kemampuan mahasiswa mengartikulasikan analisis ekonomi yang memadukan pertimbangan efisiensi dan distribusi, serta (3) munculnya orientasi tanggung jawab sosial dalam formulasi solusi ekonomi. Dengan indikator tersebut, pendidikan ekonomi berbasis keadilan dan masalah berpotensi melahirkan lulusan yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga memiliki sensitivitas etis dan kesadaran struktural terhadap persoalan ekonomi kontemporer. Transformasi ini menegaskan urgensi pendidikan ekonomi sebagai instrumen strategis dalam membangun sistem

ekonomi yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Daftar Pustaka

- Abduh, A. N., Kabir, A. S. Z., Zein, Z., & Bakar, M. Y. A. (2024). Pandangan filsafat tentang hubungan manusia dan pendidikan. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(6), 445-458.
- Aulia, N. P., Rozalinda, R., Musdalifah, A. A., & Fiqram, M. (2025). Analisis Prinsip Keadilan dalam Transaksi Ekonomi Syariah Berdasarkan Perspektif Maqashid al-Syari'ah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 9173-9190.
- Fariied, F. S. (2025). Prinsip Keadilan Sosial Dalam Pengaturan Pendidikan Di Indonesia= Principles Of Social Justice In Educational Settings In Indonesia (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Firdiansyah, Y., Aprillia, A. F., & Aditya, M. N. (2024). Dampak pembelajaran ekonomi Islam dalam membentuk perilaku moralitas ekonomi mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi*, 8(2), 133-139.
- Ibrahim, E. K. (2025). Analisis Konsep Masalah sebagai Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 7(2), 1-19.

- Mubarok, A. Z., Hidayat, A. D., Kaswoto, J., Fatahilla, W., Mulyon, A., Dewi, A. D. M., ... & Sudarmanto, E. (2025). *Ekonomi Islam*. Minhaj Pustaka.
- Murniawaty, I., Farliana, N., & Solihat, A. N. (2025). *Desain, Strategi, dan Evaluasi Pembelajaran Ekonomi*. Seval Literindo Kreasi.
- Ramadhani, A. H., Abdillah, D. N., Afianto, M. V., Yafi, M. A., Ibadi, A. F., Attoillah, M. A., & Kurniawan, T. (2025). Integrasi Tafsir Al-Qur'an dan Hadits dalam Membangun Kerangka Nilai Ekonomi Islam. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 3(4), 207-217.
- Ristianah, N. (2020). Internalisasi nilai-nilai keislaman perspektif sosial kemasyarakatan. *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 1-13.
- Sari, I. P., & Fattah, M. (2025). Development of Islamic Value-Based Economics from a Sharia Economic Perspective. *Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(2), 113-119.
- Suryadi, N. (2025). Rasionalitas Ekonomi Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktis: Dari Homo Economicus Hingga Rasionalitas Syari'ah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(3).
- Wahjoedi, W., Suyono, A., Prakoso, A. F., Utama, A. P., Rosy, B., Puspasari, D., ... & Nuryana, I. (2022). *Problematika*

Pendidikan Ekonomi; Suatu Analisis Filosofis dan Kajian Praktis (Vol. 1). Academia Publication.

Yusriza, Y., Irhamna, I., & Rahayu, E. (2025). Bias Perilaku dalam Keputusan Keuangan: Perspektif Ekonomi Perilaku Modern. *Economia: Journal of Economics and Management*, 4(2), 101-120